



Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Edisi II Tahun 2015



Mewujudkan Wahana
Salatiga *Science Park*

Diterbitkan oleh :
Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga



DPRD Salatiga

Hentikan Paksa Galian Kabel Optik Liar

Foto: budi's

Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE meminta untuk menghentikan penggalian kabel optik di sepanjang trotoar di Jalan Fatmawati, Dukuh Blotongan. Galian kabel optic tersebut merusak fasilitas umum dan liar.

M. Teddy Sulistio juga meminta kepada pihak Bina Marga Kota Salatiga agar tidak mudah mengeluarkan ijin dan memperketat ijinnya. "Kita harus tegas, kalau tidak kita akan diinjak-injak, kota kita akan rusak," tandasnya.

Bung Teddy menilai dengan kejadian ini, membuktikan bahwa pengawasan terhadap galian kabel ini lemah, demikian pula koordinasi antar sektor juga kurang.

"Kami minta supaya ijin yang akan dikeluarkan (sudah masuk) untuk dievaluasi kembali," tandasnya. (ss/ss)



Foto: budi's



Daftar Isi

- 4 **Redaksi:** Salatiga *Science Park* dan Pertumbuhan Ekonomi Salatiga
- 6 **Mimbar:** Mewujudkan Wahana Salatiga *Science Park*; *Car Free Day* Kurangi Polusi Udara Kota; Bank Sampah, Pengelolaannya Perlu Ditingkatkan.
- 10 **Laporan Utama:** Pendidikan Dasar Berstandar Internasional sebagai pembeda Kota; Mewujudkan Stabilitas Keamanan yang Kondusif; Pelestarian Kesenian Tanggungjawab Seluruh Masyarakat; Alokasi APBD Harus untuk Kesejahteraan Masyarakat; Salatiga Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Pertukaran Pelajar Tingkatkan Mutu Pendidikan.
- 22 **Wacana:** Antisipasi Penyimpangan Dana Desa.
- 24 **Opini:** Kedudukan Baru DPRD di Era Otonomi Daerah.
- 26 **Artikel:** Trisula Kecamatan.
- 28 **Warta:** Seputar kegiatan anggota DPRD Kota Salatiga.
- 33 **Profil:** Slamet Widodo, Penjual Nasi Jagung Goreng "Lereng Cinta".
- 34 **Rileks:** Tebak Wajah Jiwaraga 27.

Salatiga *Science Park* dan Penumbuhan Ekonomi Salatiga

Berdasarkan tujuan utamanya, Salatiga *Science Park* akan mampu melahirkan dan mengembangkan industri baru yang berbasis teknologi, dimana pada umumnya industri tersebut berbentuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Salatiga *Science Park* juga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia industri dengan keahlian tinggi yang mampu mendukung pertumbuhan industri besar dengan menarik mereka masuk ke dalam Salatiga *Science Park*

Semakin banyak Industri Kecil dan Menengah yang lahir melalui proses inkubasi teknologi dan bisnis di Salatiga *Science Park* nantinya diharapkan mampu memberikan efek berantai (multiplier effect). Terhadap perekonomian Kota Salatiga. Semakin banyak tenaga kerja diserap, semakin besar aktivitas ekonomi, maka diharapkan semakin tinggi pendapatan daerah dari pajak, dan lainnya.

Demikian juga tersedianya tenaga kerja, tenaga kerja industri dengan kualifikasi yang lebih tinggi melalui berbagai program pelatihan di Salatiga *Science Park*, berujung pada tingkat pendapatan tenaga kerja yang lebih baik. Hal ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan warga Salatiga.

Yang pasti, industri akan semakin berkembang dengan produktivitas yang lebih baik, peningkatan penghasilan dan pajak, dan seterusnya untuk penumbuhan ekonomi Kota Salatiga, serta efek-efek ekonomi yang diberikan oleh Salatiga *Science Park* pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kota Salatiga. Semoga !

Redaksi

Jiwaraga
Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.**

PENASEHAT : Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE; Wakil Ketua DPRD, M. Fathur Rahman, SE., MM; **PEMBINA :** Wakil Ketua DPRD, Ir. Hj. Diah Sunarsasi; **PENGARAH :** Sekretaris DPRD : Drs. V.T. Haribowo; **PEMIMPIN REDAKSI :** Kepala Bagian Humas, Rumah Tangga dan Perpustakaan, Kukuh Ngudiono, SIP; **REDAKTUR PELAKSANA :** Kepala Sub Bagian Humas, Budi Susilo, S.Sos; **KOORDINATOR LIPUTAN :** Inna Kartikasari, S.Pt, MM; **PELIPUT/PENYUNTING :** Ign. Budi Kristiawan, Esti Priyanti, Lukman Fahmi, S.HI, Dwi Kadarsih, Devyna Kristiyani; Sudibyo, Fatih Ashthifani, Hari Oktavia; **SETTING & LAY OUT :** Putra Karya Offset; **DISTRIBUSI :** Udiono, Kusno dan distributor Kelurahan se-Kota Salatiga; **ALAMAT REDAKSI :** SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674.

Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah yang dilengkapi foto dialamatkan ke Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga, atau ke email: majalahjiwaraga@gmail.com. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

“Salatiga Semakin Kondusif dan Aman”

SALATIGA – Ketua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE berharap jalinan komunikasi seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Salatiga terjalin dengan baik. Usai melaksanakan sidang paripurna pada 15/06 di gedung dewan Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Ketua DPRD langsung mengajak segenap unsur Forkopinda koordinasi untuk membahas situasi dan kondisi Salatiga saat ini di RM Ki Penjawi.

Berkenaan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di Salatiga, perlu di jaga agar stabilitas keamanan nasional aman dan terkendali. Kamtibmas mendorong tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkap, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (ss/ss)



Saluran Mampet Air Menggenang

Di musim hujan jika curah hujan agak deras, di sekitaran Jl. Diponegoro akan terjadi genangan air yang cukup mengganggu para pengguna jalan raya. Genangan yang ada cukup tinggi sehingga pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki terganggu, kadang banyak sampah dan batu kerikil yang berbahaya.

Mohon sekiranya Pemerintah Kota Salatiga terutama dinas terkait agar memperhatikan system drainase maupun kebersihan saluran got yang ada. Mohon diperhatikan juga kemungkinan dengan penambahan tenaga kebersihan untuk saluran dan papan larangan membuang sampah di saluran/got. Selain sangat mengganggu juga akan menyebabkan kerusakan aspal jalan yang pada akhirnya kembali merugikan pengguna jalan.

Mega Dewi
Warga Kemiri Candi.

Optimalisasi Ruko di Jalan Kartini

Ketika dulu warung di atas bantaran saluran di Jalan Kartini digusur dengan alasan akan dikembangkan menjadi ruang terbuka bagi publik, warga menyambut dengan antusias karena wilayah yang tadinya terlihat kumuh akan menjadi tertata. Seiring berjalannya waktu memang pembangunan di area Jalan Kartini telah selesai dari Selasar Kartini hingga samping SMP 1 Salatiga, namun problem kembali muncul ruko-ruko yang disediakan Pemkot hingga kini tidak ada

penyewanya, bahkan terkesan dibiarkan mangkrak. Di malam hari, adanya penerangan yang minim menambah kesan kusam. Apalagi ruko yang disebelah timur gerbang SMA 3, posisinya yang terlindung dari pandangan jalan sehingga sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak senonoh.

Dulu sempat Satpol PP mengadakan patroli, namun sekarang sudah tidak terlihat lagi. Hal ini diperlukan langkah nyata dari Pemkot agar ruko yang dibangun tidak rusak sia-sia, sehingga pengembangan ekonomi masyarakat berjalan. Masyarakat yang berwisata keluarga disana nyaman dan aman. Begitupun para pedagang yang menyewa ruko.

Fajar
warga Margosari Salatiga

Karikatur





Industri kecil menengah berbasis inovasi

Keberadaan STP memang digunakan bagi sebuah sarana dalam bentuk kawasan yang disiapkan secara khusus guna mengalirkan pengetahuan dan teknologi diantara lembaga litbang, lembaga pendidikan dan industri.

“Kita harapkan, dengan adanya STP ini akan dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri-industri, khususnya industri kecil menengah yang berbasis inovasi melalui kerjasama yang baik. Disamping itu juga dapat menyediakan layanan bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus”. Jelas Ketua DPRD Kota Salatiga.

Lebih lanjut Ketua DPRD menjelaskan bahwa keberadaan STP diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, karena melalui adanya fasilitas yang sinergi antara fungsi dan peran akademisi, pemerintah, swasta dan masyarakat, maka penyediaan lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan riset, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan akan dapat terwujud.

“Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan perusahaan pemula yang berbasis teknologi serta penyediaan dukungan sumber daya manusia dan

teknologi bagi industri, baik melalui pelatihan sumber daya manusia industri, maupun penyediaan dukungan riset, sarana dan prasarana serta jaringan untuk digunakan oleh industri memang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Salatiga” tandasnya.

“Apapun adanya, Salatiga yang sebentar lagi akan dikelilingi jalan TOL Semarang Solo ini harus memiliki magnet tersendiri, maka wacana pembangunan Wahana Salatiga Science Park ini perlu kita dukung bersama. Adanya wahana berbasis kawasan seperti STP ini, akan membuat pola hubungan yang sinergi antar unsur-unsur tersebut menjadi lebih efektif, karena tidak terkendala oleh jarak yang saling berjauhan.

“Adanya wahana yang akan kita bangun tersebut akan menciptakan sebuah system dimana inovasi-inovasi bisa bekerja dan inovasi tersebut dapat berlangsung. Hal ini sangat penting guna mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Dengan begitu, STP akan dapat berperan sebagai penghubung inovasi daerah, yang mampu mensinergikan antara lembaga pendidikan, lembaga litbang, dunia usaha dan industri, pemerintah serta lembaga pendukung dalam sebuah kawasan tersebut” pungkasnya. **(ss/int)**

Car Free Day Kurangi Polusi Udara Kota



Wakil Ketua. M. Fathur Rahman. SE. MM

Foto: dok.humas

Kota-kota besar maupun kecil di Indonesia mulai merasakan dampak dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Wakil Ketua DPRD Salatiga, M. Fathur Rahman, SE. MM, di Salatiga beribu-ribu kendaraan telah memadati setiap jalan. Menurut politisi PKS ini, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Salatiga akan berdampak makin tingginya polusi udara. Padahal Salatiga terkenal akan kesejukannya.

“Warga masyarakat Kota Salatiga diam-diam telah teracuni oleh udara kotor yang mereka hisap akibat meningkatnya jumlah kendaraan!”, demikian kata Fathur Rahman.

Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga memiliki inisiatif untuk mengurangi jumlah pengendara yang berlalu lintas serta mengurangi polusi yang dihasilkan. Sehingga Kota Salatiga yang terkenal dengan Kota Pendidikan dan Olahraga ini akan tetap terjaga kesejukannya. Salah satu kegiatan yang sedang di perkenalkan oleh Pemerintah Kota Salatiga yang mungkin cara efektif adalah Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*).

“Saya sangat mendukung program pemerintah CFD tersebut”, tegas Maman. Menurutnya kegiatan *Car Free Day* sangat memiliki banyak manfaat dari segi lingkungan maupun sosial. Dengan adanya program CFD, kualitas udara di Salatiga akan membaik. Selain

itu warga Salatiga akan berkumpul pada satu tempat yang sama serta melakukan kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh seperti bersepeda, senam ataupun bentuk olahraga lainnya. Walau belum diberlakukan rutin setiap minggu dan hanya jalur tertentu, namun *Car Free Day* mendapat tanggapan yang begitu antusias dari masyarakat.

“Namun pemerintah perlu meninjau ulang program CFD!”, ungkapnya. Jalur yang digunakan saat terakhir dilaksanakannya CFD berada pada lokasi yang sekitarnya terdapat tempat-tempat ibadah. Alangkah baiknya jika CFD dilaksanakan pada lokasi yang tidak mengganggu kegiatan ibadah seperti di area Selasar Kartini. Selain itu pemerintah juga perlu menegaskan area yang tidak boleh dilewati kendaraan agar tidak ada lagi yang melanggar area CFD. Tidak hanya itu, agar CFD semakin diminati oleh masyarakat harusnya juga dibarengi kegiatan lain yang menarik animo masyarakat seperti kegiatan pentas budaya Salatiga, senam massal atau kegiatan lain.

Menurut Maman yang juga senang dengan olahraga ini, sebenarnya CFD juga dapat dimanfaatkan para wakil rakyat Salatiga sebagai ajang mendekatkan diri pada masyarakat. Lewat kegiatan bebas hari kendaraan ini, para wakil rakyat dapat memberi informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan dibarengi dengan kegiatan olahraga. “Dengan begitu keakraban para anggota DPRD dan rakyatnya akan lebih harmonis”, tutupnya. **(is/ss)**

Bank Sampah Pengelolaannya Perlu Ditingkatkan



Foto: boedy's

Wakil Ketua. Ir. Hj. Diah Sunarsasi

Pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap sampah dirasa kurang memiliki kesadaran yang tinggi. Padahal sampah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran air, tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir.

Selain itu sering pula timbunan sampah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau yang kurang enak. Sampah ditimbulkan dari sisa aktivitas manusia yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik.

“Karena membahayakan kesehatan dan lingkungan maka sampah harus dikelola semaksimal mungkin”, terang Ir. Hj. Diah Sunarsasi Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga. Pemerintah yang sampai saat ini sudah melakukan sosialisasi mengenai sampah harus ditingkatkan secara terus menerus sehingga masyarakat paham tentang masalah yang ditimbulkan dari sampah.

Menurut Ir. Hj. Diah Sunarsasi, sampah dihasilkan dari masyarakat. Sehingga masyarakat juga yang harus dilibatkan dalam pengelolaan sampah tersebut. Jika sampah dikelola dengan baik bukan

menjadikan sesuatu yang menjijikkan. Tapi justru merupakan barang yang bisa memberikan nilai ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan peran serta pemerintah secara aktif dan terstruktur. Jangan setengah-setengah.

“Dalam pengelolaan sampah, sistem yang kita bangun harus melibatkan peran serta masyarakat secara luas, selain itu pemerintah juga harus penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan”, kata Diah Sunarsasi.

Pemerintah perlu membuat kajian secara sistematis dan sesegera mungkin tentang pengelolaan sampah sebelum diangkut ke Tempat Penmbuangan Akhir (TPA).

“Dengan terbangunnya kesadaran masyarakat akan masalah sampah, Inshaallah sampah bisa memberi nilai ekonomis”, tambah Wakil Ketua DPRD Salatiga dari Partai Gerindra ini.

“Wajib Hukumnya Pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga pada akhirnya warga akan memiliki kesadaran terhadap permasalahan di lingkungannya masing-masing. Dengan begitu, Adipura akan mudah diperoleh di Kota Salatiga”. tutup Ir. Diah Sunarsasi. (is/ss)

Pendidikan Dasar Berstandar Internasional Sebagai Pembeda Kota

Ketua Komisi A. Dance Ishak Palit, M.Si.

Salatiga sebagai Kota Pendidikan menunjukkan pendidikan adalah pembeda kota. Untuk itu penguatan bidang pendidikan harus dilakukan secara maksimal, berupa pengembangan sarana prasarana, tenaga pendidik dan lingkungan belajar. Semuanya harus mengkondisikan pada penciptaan profil siswa dengan prestasi akademik maupun non akademiknya yang berstandar internasional.

Dance Ishak Palit, M. Si, Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga mengharapkan agar pendidikan di Salatiga menjadi sekolah berstandar internasional. Pendidikan harus menjadi pembeda sekaligus keunggulan kompetitif kota. Ekspektasi ini harus tergambar pada kebijakan dan keberpihakan dalam politik anggaran pada APBD kota. Memang saat ini sesuai aturan, pendidikan dasar adalah bidang yang secara langsung ditangani oleh Pemerintah Kota sementara itu pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditangani oleh provinsi. Sehingga Pemerintah Kota Salatiga akan lebih fokus pada penanganan pendidikan dasar (DIKDAS).

“Kita berharap DIKDAS di Salatiga harus betul-betul dikelola secara baik dari sisi proses pembelajaran maupun fasilitas sarprasnya” tegas Dance. “Pooling of Resources dari segi tenaga dan sarana prasarana harus dikembangkan antara satu sekolah dengan yang lain sehingga terjadi pemerataan dari segi mutu pendidikan. Termasuk pengembangan pusat-pusat pendidikan yang tidak hanya terkonsentrasi di sekolah yang ada di pusat kota saja tetapi juga yang ada

dipinggiran. Selain itu perlu ada ciri khas dan keunggulan kompetitif yang dibuat disetiap sekolah. Kita perlu melakukan bench marking DIKDAS dengan sekolah unggulan di luar negeri. “Kita berharap kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland Australia dapat digunakan Salatiga dalam pengembangan DIKDAS nya” tegas Dance.

“Sekolah Qoriyah Toyiba Kalibening sudah memperlihatkan sebagai sekolah nonformal berbasis komunitas di Salatiga yang diakui secara internasional. Itu akan menjadi inspirasi bagi pengembangan DIKDAS Kota Salatiga”, tambahnya.

Dance berharap agar indikator-indikator terhadap pelayanan mutu sekolah tidak hanya memakai standar pelayanan minimal atau SPM. Kita harus berani untuk menetapkan standar pelayanan yang lebih dari itu, jika penyelenggaraan sekolah kita mau diakui oleh daerah lain. Untuk itu sementara digagas kerjasama dengan beberapa universitas pengembangan SDM guru pada Strata 2 (S2). Dari sisi sarpras sekolah mulai tahun 2016 secara bertahap akan dibangun sarpras sekolah yang memadai.

“Bangku, meja, papan tulis, dan media pendidikan lainnya, harus berstandar internasional termasuk lingkungan belajarnya” jelasnya.

Setiap sekolah harus memiliki keunggulan kompetitifnya, dan sementara kita juga sedang menggagas sekolah-sekolah wawasan kebangsaan sebagai unggulan Kota Salatiga di tengah-tengah krisis wawasan kebangsaan yang muncul dalam kehidupan generasi muda saat ini. **(is/ss)**

Foto: boedy's



Generasi Muda Berhak atas Pelestarian Kebudayaan

Wakil Ketua Komisi A, Drs. H. Bambang Riantoko

Foto: boedy's

Saat ini banyak masyarakat secara perlahan meninggalkan budaya lokal atau tradisional dan lebih memilih budaya yang lebih modern. Ini terjadi karena adanya proses perubahan sosial seperti akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah proses masuknya kebudayaan baru yang secara lambat laun dapat diterima dan diolah dengan kebudayaan sendiri, tanpa menghilangkan kebudayaan yang ada. Asimilasi adalah proses masuknya kebudayaan baru yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga, Drs. H. Bambang Riantoko, sebagai warga negara terlebih generasi muda Indonesia yang mempunyai hak penuh atas kebudayaan tersebut seharusnya melestarikannya bukan malah mengesampingkannya dengan berbagai alasan seperti takut dibilang ketinggalan jaman.

“Harus ada upaya untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia khususnya Salatiga”, tegas Bambang.

Upaya untuk mempertahankan budaya Salatiga. Pertama, secara mekanisme pemerintahan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus punya rasa empati dan peduli terhadap budaya di Salatiga.

Kedua, tokoh masyarakat dan tokoh adat pada setiap daerah diberi pengarahan dan penyuluhan mengembangkan serta mempertahankan budaya dan adat istiadat.

“Pulau Bali yang digempur dan dimasuki budaya dari luar karena banyak turis yang datang tetapi kebudayaan Pulau Bali masih kuat dan kental karena tokoh adat atau tokoh masyarakat Pulau Bali masih menjunjung dan mempertahankan kebudayaannya dengan rutin melaksanakan upacara adat, kesenian-kesenian tari”, tutur Bambang Riantoko.

Ketiga yaitu dengan mematenkan budaya agar menjadi ikon atau kebudayaan pada suatu daerah.

Kebudayaan yang harus dilestarikan di Salatiga, diantaranya budaya yang berbentuk kesenian seperti reog, kebudayaan bersifat religi seperti nyadran atau sapanan yang masih erat dengan kepercayaan dan dijadikan budaya yang diperingati pada hari-hari tertentu. Tidak kalah penting adalah kebudayaan yang bersifat kuliner.

Upaya lain dari pemerintah yang kiranya dapat menarik antusias masyarakat untuk melestarikan budaya perlu kita tingkatkan terus menerus.

“Lindungilah dan beri pendanaan serta dampingi para tokoh dan para pemimpin, melaksanakan kegiatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan antusias warga Salatiga”, harapan Bambang Riantoko. **(is/ss)**

Mewujudkan Stabilitas Keamanan yang Kondusif

Ketua Komisi B, H. Budi Santoso, SE. MM

Peristiwa pembegalan masih terus diperbincangkan dan sering terjadi. Meski di Kota Salatiga masih tergolong rendah data kriminalitasnya namun masyarakat harus terus waspada. Demikian komentar Budi Santoso, SE., MM., anggota dewan dari Argomulyo Salatiga.

Memang, beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan ini, akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan penting akan terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri, karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana antara masyarakat dan Polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil.

Dengan begitu dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Jika kita mengharapkan aparat Polri untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan yang kurang bijaksana.

Polres Salatiga saat ini telah menggalakkan program patroli rutin di wilayah Kota Salatiga, dengan

motto Quick Response-nya, telah memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Menurut Budi Santoso, dengan terobosan baru yakni Zona Patroli Sabhara, semoga dengan program tersebut dapat semakin meningkatkan peran aparat kepolisian untuk lebih memperhatikan potensi-potensi yang dapat berkembang menjadi gangguan kamtibmas, terutama berkaitan dengan konflik sosial, separatisme, kejahatan jalanan, dan gangguan agenda kegiatan penting di Kota Salatiga tercinta.

Pengaruh lingkungan tidak mungkin dihindari karena pada era globalisasi saat ini, tuntutan hidup manusia semakin tinggi, yang kemudian berdampak pada perkembangan kejahatan dan kriminalitas, yang memerlukan perhatian serta penanganan secara serius dari aparat keamanan, khususnya aparat kepolisian.

Kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi Kamtibmas yang kondusif.

"Untuk itu kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya untuk mawas diri dan peduli terhadap lingkungan agar lingkungan aman. Kejahatan akan berkurang jika semua warga secara bersama-sama menjaga lingkungannya, misalnya saja penggalakan kembali siskamling," harap Budi Santoso. (lf/ss)

Foto: boedy's

Dengan Musrenbang diharap Pembangunan Makin Terarah



Wakil Ketua Komisi B, M. Miftah

Foto: boedy's

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh camat.

Menurut anggota dewan dari PKB Kota Salatiga, M. Miftah, Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.

"Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2016 telah kita laksanakan. Melalui kegiatan Musrenbang saya berharap dapat terwujud perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga lebih terarah dan terpadu" jelas M. Miftah.

Menurutnya, dalam Musrenbang 2016 ini seyogyanya ada skala prioritas pembangunan dan kemampuan Anggaran Pemerintah Kota Salatiga. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan

bahwa Pemerintah Kota wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah yang didalamnya mengandung berbagai program kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 5 ayat (3) ditegaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

"Tahun 2016 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Salatiga. Tahun 2011-2016 adalah masa jabatan Walikota Salatiga saat ini. Hasil evaluasi kinerja walikota menunjukkan bahwa sampai dengan tahun ke-3 yaitu tahun 2014 ini, capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD baru mencapai 70%," terang M. Miftah.

Pemerintah Kota masih memerlukan kerja keras untuk mewujudkan dan mengimplementasikan RPJMD secara optimal.

"Pemkot harus melakukan kerja sama yang intensif, khususnya percepatan pembangunan dalam di pusat-pusat ekonomi, diantaranya pembangunan pasar-pasar tradisonal. Termasuk salah satunya adalah Pasar Rejosari. Dengan begitu sehingga Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat akan dapat kita wujudkan", tandas M. Miftah. (lf/ss)



Pelestarian Kesenian Tanggungjawab Seluruh masyarakat

Ketua Komisi C, H. Kemat, S.Sos

Foto: boedy's

Era modern dan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini tidak lantas membuat seseorang lupa begitu saja dengan budaya yang sudah hidup bertahun-tahun dalam masyarakatnya sejak dulu. Namun ironinya, hanya segelintir saja dari mereka yang masih berpegang teguh pada budaya warisan leluhurnya itu.

Hal inilah yang akhirnya membuat Kemat, S.Sos anggota DPRD Ketua Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki inisiatif dan harapan untuk melestarikan seni tradisional di Salatiga khususnya Seni Kuntulan.

Hal tersebut didasarkan pada fakta yang ada di Salatiga bahwa seni Kuntulan sudah mulai terkikis. “Di Salatiga kurang lebih hanya ada 2 kelompok seni yang mempertahankan Seni Kuntulan”, terangnya.

Salah satu desa yang mempertahankan seni kuntulan yaitu Desa Ngemplak dan Kumpulrejo. Seni Kuntulan merupakan kesenian bernafaskan Islam yaitu merupakan jenis kesenian yang bersumberkan agama, dimana dalam penyajiannya menitik beratkan pada nilai-nilai keagamaan.

“Kami sudah berupaya keras agar Seni Kuntulan bisa bangkit kembali”, ungkap Kemat. Hal tersebut dilakukan saat dewan perwakilan rakyat melakukan sumpah jabatan dengan menghadirkan kesenian Kuntulan ditengah-tengah acara untuk menghibur

para dewan serta rakyat yang ikut serta menyaksikan sumpah jabatan. Alhasil pertunjukan seni Kuntulan tidak mengecewakan, bahkan masyarakat pun antusias untuk menyaksikan seni tradisional yang ditampilkan secara sederhana itu.

Menurutnya Seni Kuntulan memiliki nilai-nilai pendidikan Islam dan ideologi secara umum serta dapat menanamkan sikap nasionalisme kepada masyarakat khususnya Salatiga. Kesenian langka ini mengedepankan atraksi yang bernuansa pada keimanan serta menampilkan suasana seni timur tengah ala Indonesia.

“Oleh karena itu saya berharap agar seni tradisional seperti kuntulan yang kini mulai punah harus segera ada campur tangan dari Pemerintah Kota Salatiga dan dinas terkait agar tetap lestari”, tegasnya.

Sampai saat ini ada keprihatinan karena tidak adanya kepedulian terhadap Seni Kuntulan. Dengan begitu seluruh masyarakat harus ikut andil dalam membangkitkan kembali Seni Kuntulan ini.

“Upaya pelestarian kesenian tak hanya dari pemerintah dan dinas terkait namun dari seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap tidak hanya di ngemplak dan kumpulrejo saja namun desa-desa di Salatiga juga ikut andil dalam melestarikan kesenian Kuntulan ini. Hidupkan Seni Kuntulan Di daerah Salatiga”, tutupnya. **(is/ss)**

Pemekaran Kelurahan

Optimalkan Fungsi Pelayanan Masyarakat



Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE,

Foto: boedy's

Anggota dewan dari daerah pemilihan Tingkir, Hj. Roro Endartiningrum, SE. mengemukakan bahwa masyarakat Salatiga patut bersyukur karena Kota Salatiga memiliki kelurahan baru yaitu Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul. Itu adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Kutowinangun, dengan demikian jumlah kelurahan di Salatiga bertambah satu, dari 22 menjadi 23 kelurahan.

Perlu diketahui bahwa pemekaran Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir menjadi dua kelurahan telah direalisasikan pada Maret lalu. Pemerintah Kota Salatiga telah menerima kode untuk dua kelurahan yakni Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul serta penetapan batas wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kedua kelurahan di Kecamatan Tingkir tersebut telah diresmikan oleh Walikota Salatiga bersama Ketua DPRD dan segenap Forkopinda.

Yang kita harapkan dari pemekaran ini adalah akan semakin optimalnya fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski terpisah

secara administrasi, jangan sampai keguyuban masyarakat Kutowinangun jadi berkurang.

"Kita patut bersyukur, setelah melewati perjalanan panjang dan bertahap sejak tahun 2009, akhirnya Kota Salatiga telah berhasil melaksanakan pemekaran kelurahan Kutowinangun sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan," terangnya.

Diketahui bersama, usulan pemekaran wilayah ini telah sejalan dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan perkembangan jumlah penduduk.

Yang perlu diperhatikan seluruh warga Kutowinangun adalah konsekuen terhadap perubahan ini, dengan cara mentaati peraturan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya saja soal perubahan alamat identitas, dan lain-lain. Masyarakat diharap mendukung dan membantu permasalahan perubahan administrasi tersebut. (lf/ss)



Alokasi APBD Salatiga untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bernardus Supriyono, SE

Foto: boedy's

Era Otonomi Daerah adalah masa dimana Pemerintah Daerah diberi ruang yang luas untuk mengelola keuangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Bernardus Supriyono, SE menyoroti alokasi APBD Kota Salatiga yang dinilai masih kurang dalam pengalokasian untuk program-program bagi masyarakat, dibidang kesejahteraan masyarakat misalnya anggaran untuk bedah rumah bagi RTS (Rumah Tangga Sasaran) mungkin bisa ditambah lagi volumenya”Dari 400 RTS/tahun menjadi 600 RTS/tahunnya, ini sangat membantu bagi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Bisa juga dengan meningkatkan anggaran yang diterima RTS sehingga pembangunan bedah rumah bisa lebih tuntas karena sasaran program bedah rumah ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kehidupan mereka.” Kata anggota DPRD dari Dapil Sidorejo ini.

Pemberian stimulus baik berupa permodalan maupun peralatan bagi UMKM bisa ditingkatkan lagi karena UMKM di Kota Salatiga merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi yang cukup memberikan andil bagi penyerapan tenaga kerja. “ Namun masyarakat penerima bantuan ini harus mengerti bahwa stimulus ini diperuntukan untuk pengembangan usaha bukan untuk kebutuhan yang lain, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota agar UMKM bisa tumbuh berkembang bisa terwujud yang pada akhirnya bermuara pada

kesejahteraan warga masyarakat Salatiga” lanjut Legislator dari Partai PDI Perjuangan ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bidang-bidang yang bisa lebih mengoptimalkan perekonomian rakyat. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Salatiga ini “Tidak perlu kita membangun proyek yang besar namun kurang berdampak bagi ekonomi rakyat, cukup sekiranya pembangunan atau program itu bermanfaat langsung kepada masyarakat Salatiga. Sering terjadi pabrik yang didirikan di Salatiga namun tenaga kerjanya banyak yang dari luar daerah sehingga masyarakat Kota Salatiga tidak merasakan keuntungan dari pembangunan tersebut Jika masyarakat terpenuhi masalah ekonominya maka kondisi Kota Salatiga akan semakin kondusif.”

DPRD mendorong agar kedepannya APBD Kota Salatiga lebih proporsional antara belanja langsung maupun belanja tak langsung, terutama untuk belanja sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas, termasuk peningkatan anggaran pendidikan.

”Jika memang Pemkot mampu membiayai pendidikan gratis hingga ke jenjang SLTA, maka itu bisa juga dilaksanakan kegiatan pemberian beasiswa bagi para atlit yang telah mengharumkan nama Salatiga. Hal ini perlu dilakukan dari pada di akhir tahun anggaran menjadi SILPA yang menyebabkan kontra produktif bagi pengelolaan keuangan daerah.” tandas Bernardus Supriyono. (lf/ss).

Pemerintah Kota Perlu Menggali Potensi SDA dan SDM

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Suniprat

Foto: boedy's

Pemberlakuan Otonomi Daerah seharusnya bisa menggali potensi SDA (Sumber Daya alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) Kota Salatiga namun hal ini belum diupayakan secara maksimal oleh pihak Pemerintah Kota Salatiga menurut H. Suniprat anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga. Ini bisa dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga yang banyak berkutat pada wacana namun kurang pada pelaksanaannya terbukti dengan mandeknya beberapa proyek yang ada.

Kurangnya Political Will dari pihak eksekutif membuat pembangunan di Salatiga seakan jalan ditempat, road map Kota Salatiga sebagai kota hunian, perdagangan, jasa, wisata, pendidikan dan olahraga kurang mendapat komitmen dari Pemerintah Kota karena di era Otonomi Daerah ini perlu adanya inisiatif untuk mengembangkan potensi daerahnya.

"Rencana Pembangunan Taman Wisata Salatiga contohnya hingga sekarang tak jelas kapan realisasinya walaupun itu telah lama diwacanakan padahal jika Pemkot memberikan perhatian khusus tentunya baik Pemprov Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat akan membantu namun terkesan Pemkot hanya menunggu tanpa ada upaya untuk menjemput bola" ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

"Wisata kuliner dan wisata edukasi untuk keluarga sebenarnya bisa menjadi andalan kota ini mengingat terbatasnya wilayah Salatiga, tinggal sekarang komitmen dari Pemkot untuk

mewujudkannya. Selain bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa meningkatkan pendapatan warga disekitar objek wisata tersebut hal ini secara tidak langsung bisa mengurangi beban Pemerintah Kota dalam mengatasi pengangguran karena dengan berkembangnya wisata akan turut berimbas pada wisata kuliner yang ada di Kota Salatiga selain juga akan berkembangnya industri kreatif semacam souvenir misalnya" tambah H. Suniprat.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga ini pembangunan harus mempunyai konsep yang berkelanjutan untuk itu dibutuhkan seorang Kepala Daerah yang visioner mampu memandang Salatiga masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

"Taman kota Bendosari misalnya, terletak di pinggir Jalan Lingkar Salatiga jalan penghubung dua kota besar di Jawa Tengah Semarang dan Solo, jika kita jeli memanfaatkannya maka menjadi ikon wisata yang prospektif" tandas H. Suniprat.

"Selain menjadi hutan kota dan area penghijauan bisa dimanfaatkan sebagai rest area dari sini bisa diambil manfaat dari sisi wisata kuliner" tambahnya.

"Area Downhill yang ada bisa dimanfaatkan untuk sarana event olahraga sehingga mengangkat pamor Kota Salatiga. Namun hal ini kurang mendapat perhatian dari Pemkot yang selama ini hanya berkutat pada kegiatan yang berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya inovasi", pungkasnya. (wj/ss)

“SALATIGA Menuju” Masyarakat Ekonomi Asean 2015



Foto: boedy's

Supriyadi Fatkhi.

Salatiga sekarang ini menghadapi tantangan besar khususnya masalah perkembangan ekonomi dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*. Sebenarnya kita sendiri yang mengharuskan segera diberlakukan dan ini merupakan inisiatif dari kita, sehingga Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) akan diberlakukan pada Desember 2015 mendatang.

Menurut anggota DPRD Salatiga Supriyadi Fatkhi, percepatan yang perlu dilakukan sebagai kebijakan dari pelaksanaan MEA 2015 adalah : Yang pertama, percepatan kompetensi tenaga kerja di semua sektor. Kedua, percepatan sertifikasi profesi yang dibangun oleh sektor yang ada serta ketiga adalah pengendalian tenaga kerja asing.

“Semua percepatan tersebut, muaranya pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja kita, sehingga ketika berkompentensi dengan tenaga kerja asing kita sudah lebih unggul” tandasnya.

Perlu diketahui bersama bahwa, berdasarkan pengantar KUA dan PPAS Kota Salatiga tahun 2014, prioritas pembangunan Pemkot adalah diantaranya adalah meningkatkan mutu, kualitas pendidikan

dan tenaga pendidik; Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita dan pencegahan penyakit menular; Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastuktur serta ruang terbuka hijau; Meningkatkan akses sumber daya produktif terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana informasi pasar; serta peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Dengan begitu, diakhir jabatan walikota pada 2016 nanti, perlu ditekankan realisasi pendapatan minimal 80% dari potensi PAD bukan dari target PAD. Selain itu, manajemen perencanaan perlu ditata ulang agar tidak terjat silpa trap, serta koordinasi antar SKPD agar lebih terorganisir dengan baik khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

“Kita semua yakin bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi kita yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat membawa Salatiga menjadi kota yang makmur, sejahtera, adil, mandiri dan bermartabat” kata Bapak Supriyadi Fatkhi. (lf/ss)

Adipura

Perlu Komitmen Bersama



Foto: boedy's

Taufiq Eko Priyatno

Adipura sedang hangat-hangatnya dibicarakan di Kota Salatiga ini. Adipura merupakan penghargaan tertinggi untuk kebersihan dan pelestarian lingkungan kota. Penghargaan ini diberikan tiap tahun untuk kota-kota yang mampu menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan. Untuk meraih penghargaan Adipura, semua nominasi harus melalui lima tahapan penilaian.

Perlu kita ketahui bersama, program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dan teduh serta nyaman.

Menurut Taufiq Eko Priyatno, didalam penilaian Adipura, Kota Salatiga masuk kategori Kota Sedang, dengan jumlah penduduk 192.291 jiwa. Kota Salatiga pernah mendapatkan Piala Adipura Tahun 1994. Sedangkan beberapa tahun belakangan ini, Kota Salatiga belum dapat memperoleh Penghargaan Adipura.

"Untuk mengupayakan diperolehnya kembali Penghargaan Adipura, Pemerintah Kota Salatiga harus terus berupaya agar setiap instansi solid,

terlaksananya Kerja Bakti Resik-resik Kutho yang dilaksanakan oleh SKPD maupun masyarakat, maksimalnya peran perusahaan atau swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility), selanjutnya perbaikan di titik-titik penilaian Adipura secara fisik dan administrasi, serta kegiatan lain yang melekat pada anggaran SKPD masing-masing" jelas Taufiq Eko Priyatno yang duduk di Komisi A DPRD Kota Salatiga bidang Bidang Hukum dan Pemerintahan ini.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk meraih Adipura, Kota Salatiga harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kelestarian lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu kebersihan dan pelestarian lingkungan kita akan selalu terjaga, karena adanya kepedulian seluruh lapisan masyarakat Salatiga.

"Jika itu terlaksana dengan baik maka tidak sulit bagi Kota Salatiga untuk meraih Adipura. Saya selaku anggota DPRD Salatiga sangat mendukung usaha peraih Adipura, namun kinerja ini jangan dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan penghargaan saja. Seharusnya ini dilaksanakan setiap saat, masyarakat dan semua instansi dibiasakan untuk berperilaku bersih," terangnya. (lf/ss)

Pertukaran Pelajar Tingkatkan Mutu Pendidikan



Nono Rohana, S.Ag

Foto: boedy's

Indonesia khususnya Salatiga telah mengalami perkembangan yang begitu banyak di tahun-tahun belakangan ini seperti dalam bidang teknologi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya.

Perkembangan dalam pendidikan merupakan perkembangan yang paling signifikan. Salatiga yang merupakan Kota Pendidikan dan Olahraga ini juga mendukung penuh kegiatan yang bersifat edukasi baik dikalangan siswanya ataupun pengajar.

“Kegiatan yang dimaksud yaitu program pertukaran pelajar baik Salatiga ke luar ataupun luar ke Salatiga (dalam dan luar negeri)”, demikian yang disampaikan oleh Nono Rohana SAG, anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga.

Nono begitu panggilannya, mengungkapkan bahwa program pertukaran pelajar merupakan program yang sangat baik serta dapat menambah wawasan mengenai mutu pendidikan bagi pelajar yang mengikuti program tersebut. Tidak hanya pendidikan akademik atau keilmuan formal saja, namun pertukaran pelajar juga dapat dilakukan karena bakat dari pelajar seperti kesenian ataupun olahraga.

“Melalui interaksi dengan pelajar lain, pelajar dapat belajar berbagi, berkomunikasi, menghargai dan mencintai satu sama lain diatas perbedaan yang ada”, terangnya.

Ketika pelajar mengikuti program itu maka harapannya adalah dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut. Apa yang diperoleh dapat disalurkan kepada rekan-rekannya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, diharapkan akan tumbuh pemimpin-pemimpin masa depan yang menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi perdamaian dan persahabatan.

Pemerintah juga harus membekali wakil pertukaran pelajar dengan wawasan kebangsaan yang Salatiga miliki. Sehingga, para siswa dari Salatiga dapat menjadi representasi muda yang baik dalam memperkenalkan budaya atau semua hal tentang Salatiga yang dapat bernilai komersial untuk Salatiga.

“Jadi secara tidak langsung, mereka bisa menjadi subjek yang berguna dalam rangka mempromosikan Salatiga bertaraf nasional maupun internasional”, ungkapinya.

Selain itu, Nono Rohana juga mengungkapkan bahwa bentuk lain dari dukungan DPRD khususnya di Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan terhadap pendidikan di Salatiga adalah mengusulkan tidak hanya siswa saja yang mengikuti pertukaran, namun dari pengajarnya juga harus ada program pertukaran pengajar baik di Kota Salatiga maupun diluar Kota Salatiga. **(is/ss)**

Pasar Tradisional yang Bersih Meningkatkan Daya Tarik



Mahmudah, SH

Foto: boedy's

Pasar tradisional atau pasar rakyat selalu identik dengan suasana kumuh, jorok, dan beragam atribut tak sedap lainnya selalu melekat. Tapi jika dikelola dengan baik, pasar tradisional ini sebenarnya bisa menghadirkan pembeli yang banyak.

Suasana pasar tradisional yang biasanya kumuh, becek, dan padat itu tak terlihat ketika kita memasuki Pasar Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Pasar ini begitu bersih dan rapi, dengan menggunakan lantai keramik, sedang para pedagang menata dagangannya secara rapi di lapak.

Salatiga harus berkomitmen untuk mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui peran serta segenap stakeholder dan komunitas pasar.. Demikian kata anggota dewan Kota Salatiga dari Partai Persatuan Pembangunan, Mahmudah, SH.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan perwujudan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Menurut Mahmudah, gerakan pasar bersih menjadi tepat mengingat pasar tradisional memegang peranan penting dalam menyediakan

pasokan logistik pangan yang sehat dan bergizi bagi masyarakat, yang tentu saja sangat berperan terhadap kesehatan masyarakat.

Namun di sisi lain, pasar tradisional sering dikaitkan dengan penyebaran beberapa penyakit baik yang bersumber dari binatang maupun bahan pangan lainnya.

Pernyataan ini dikaitkan dengan lingkungan pasar tradisional yang sebagian besar tidak higienis, sanitasi buruk, pedagang serta konsumen yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat.

"Oleh karenanya, Pemerintah Kota Salatiga harus berupaya mewujudkan pasar tradisional yang sehat bersih, aman dan nyaman, melalui pemberdayaan komunitas pasar. Dengan memberdayakan komunitas pasar, merupakan langkah yang sangat tepat. Saya yakin, komunitas pasar memiliki rasa handarbeni terhadap keberadaan dan keberlangsungan suatu pasar itu sendiri," jelasnya.

"Demi mewujudkan hal tersebut, saya meminta komitmen pemerintah, pedagang dan semua pihak yang memanfaatkan pasar tradisional untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pasar sehat di Kota Salatiga" tambah ibu Mahmudah. (lf/ss)



ANTISIPASI PENYIMPANGAN DANA DESA

Oleh : Prasetiyo Ichtiarto ^{*)}

Memasuki pertengahan tahun ini membawa berkah bagi pemerintahan di tingkat desa, pasalnya melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) akan menggelontorkan dana desa Rp. 20 triliun. Menurut laporan BPS 2012 desa seluruh Indonesia berjumlah 77.548 desa dari 33 provinsi. Kalau diambil rata-rata, maka Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 8.578 desa mendapatkan gelontoran dana sebesar Rp 279 milyar baru untuk 106 desa.

Dana desa tersebut akan disalurkan secara bertahap, bukan pertahun selama kurun waktu lima tahun. Anggaran ini akan dititipkan di pemerintah kabupaten, dimana penggunaan dana berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes. Karena itu desa diminta mempersiapkan rencana program untuk penggunaan jangka menengah dan rencana kerja program (SM/12/11/14)

Istilah “berkah” menurut penulis diterjemahkan dalam rasa senang. Sehingga bagi mereka yang bekerja pada aras desa diharapkan lebih mudah untuk mewujudkan kemandiriannya dalam menjabarkan dana sesuai kebutuhan masyarakat. Karena selama pemerintahan orde baru sampai reformasi belum pernah pemdes mengelola dana milyaran rupiah. Ada kecenderungan sekarang ini, pelaksanaan pembangunan yang berada di desa masih menggunakan pendekatan top down planning dari pada botton up planning.

Sebaliknya, kalau dana sebesar itu tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan regulasi yang ada, akan membawa “musibah” pada aparat di aras pedesaan. Berbagai pihak masih meragukan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa. Di pihak lain, aliran dana yang diterima pemdes tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Pertanyaannya, apakah aparat desa mampu untuk melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan, baik aspek akuntabilitas, transparan dan responsibilitas ?

Kalau penyimpangan itu dilakukan oleh pelaku organisasi kegiatan di desa, maka sudah pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jangan sampai dana desa yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Sehingga

permasalahan baru akan terjadi, kasus korupsi yang saat ini banyak terkena aparat di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota akan berimbas ke desa.

Timbulnya masalah hukum di desa ini perlu diantisipasi sedini mungkin oleh semua pihak. Jika kondisi ini tidak dilakukan dengan bijaksana, akan menambah deretan panjang para pelaku yang melakukan tindakan korupsi di desa. Sekurangnya ada beberapa variabel yang menjadi kendala terhadap pengelolaan keuangan di desa.

Pertama, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di pemdes. Kebanyakan aparat yang ditempatkan di desa memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata dibandingkan PNS di pemerintahan kabupaten. Meskipun ada yang berpendidikan sarjana, tetapi bukan yang memiliki latarbelakang keuangan, karena tenaga akuntansi masih banyak dibutuhkan di SKPD serta keengganan yang bersangkutan di tempatkan di pemdes.

Kedua, percepatan kegiatan yang sangat dinamis di tingkat kabupaten belum dapat diikuti pelaksanaan di pemdes, sehingga mempengaruhi kinerja dan target yang dicapai. Artinya tugas yang dilakukan di desa lebih berorientasi pada tugas operasional di lapangan, bukan sebagai tenaga perencanaan dan administrasi keuangan. Misalnya dalam penyusunan program kegiatan belum dapat menunjukkan input, output, outcome impact dan benefit

KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Ketiga, kemampuan penguasaan teknologi informasi yang belum optimal. Ini dapat dilihat dari beberapa perangkat komputer di desa yang hanya dimanfaatkan untuk pengetikan surat saja. Padahal jika mereka dapat menguasai hard ware maupun soft ware akan mempermudah serta mempercepat pekerjaan yang akan dilakukan. Nantinya, dengan jumlah dana yang diterima cukup besar memerlukan laporan keuangan yang cukup kompleks. Peran program komputerisasi dan aplikasi keuangan sangat penting, sehingga dibutuhkan tenaga yang profesional.

Keempat, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di desa, keadaan ini tidak dapat disamaratakan dengan sebuah desa di pulau jawa yang sudah maju. Tetapi bagi desa yang terpencil jauh dari keramaian kota, maka akan berdampak pada perilaku



dan sikap mereka dalam bekerja, disebabkan kurangnya fasilitas kantor baik komputer, listrik, air dan dukungan perlengkapan lainnya.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut membutuhkan pendekatan yang startegis agar kendala yang dihadapi pemdes dapat teratasi. Sebaliknya jika kondisi ini tidak tertangani dengan cepat dan berkesinambungan, maka dana yang dikucurkan tahun ini akan sia-sia serta kurang bermanfaat pasitif bagi masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan tidak “percaya” lagi pada kinerja di institusi pemdes.

Langkah nyata yang perlu dilakukan sebelum dana mengalir di pemdes, pertama adanya komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan lembaga penegak hukum agar pemdes menjadi lembaga yang mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa. Kedua, dalam menyusun petunjuk teknis perlu diterbitkan lebih awal, sehingga pemdes leluasa dalam menyusun program kegiatan baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Ketiga, dalam menentukan pembangunan infrastruktur desa perlu dilakukan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan aspirasi yang berkembang

di masyarakat. Keempat, untuk meningkatkan pengetahuan mereka, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan teknologi komputer dan akuntansi keuangan meskipun secara sederhana bagi aparat pemdes. Kelima, adanya pendampingan oleh aparat pengawasan khususnya inspektorat, BPKP dan BPK terutama dalam pengelolaan manajemen anggaran desa akan membantu meminimalkan terjadinya penyimpangan.

Akhirnya, publik menunggu hasil nyata dari kinerja aparat di tingkat desa terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Keinginan masyarakat yang paling sederhana, bahwa dana tersebut dapat berdampak positif pada perubahan kondisi di desa dari yang jelek menjadi lebih baik terhadap pembangunan fisik maupun non fisik, seperti jembatan, jalan desa, gedung balai desa, pemberdayaan ekonomi makro (UMKM), pelatihan keterampilan dan lain-lain.

Penulis adalah PNS pada Pemerintah Kota Salatiga



Kedudukan Baru DPRD di Era Otonomi Daerah

Oleh : Drs. V.T. Haribowo *)

Efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan lembaga di Pemerintahan Daerah Oleh sebab itu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur penguatan lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah, khususnya DPRD.

Hal ini merupakan langkah maju yang perlu ada tindak lanjut implementasinya, karena elemen dasar untuk menuju sukses Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi : Unsur Perwakilan Penyelenggara yaitu Kepala Daerah dan DPRD; Kewenangan Urusan Pemerintahan; Kelembagaan (SOTK); Sumber Daya Manusia (SDM); Kewenangan Daerah; Pelayanan Publik dan Pembinaan dan Pengawasan.

Pejabat Negara

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dari unsur legislatif menjadi elemen dasar yang paling strategis. Legislatif sebagai representasi wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sering di asumsikan mempunyai kapasitas kedudukan sebagai “ Pejabat Negara “. Di era sebelum di berlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, ternyata sebutan sebagai “ Pejabat Negara “ tersebut hanya melekat khusus di Lembaga DPR saja, sedangkan untuk DPRD tidak diatur secara eksplisif.

Adapun istilah Pejabat negara dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 122 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Menurut pasal ini, yang termasuk pejabat Negara yaitu : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang diluar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur; m. Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan n. Pejabat Negara Lainnya yang

ditentukan oleh undang – undang.

Kalau kita melihat dari siapa saja yang termasuk dalam Pejabat negara maka tidak disebutkan bahwa anggota DPRD sebagai Pejabat negara.

Pejabat Daerah

Jika DPRD Kota bukan sebagai Pejabat Negara maka kedudukan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai sebutan sebagai apa ?. Pertanyaan tersebut terjawab dalam Pengaturan di UU No. 23 Tahun 2014.

Pengaturan tentang DPRD yang semula diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimasukkan ke dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar sejalan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Pengintegrasian pengaturan DPRD ini tentu saja akan mengakhiri dualisme regulasi serta mempertegas kedudukan dan fungsi DPRD sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam kerangka NKRI.

Pengaturan Kedudukan Baru dalam rangka penguatan lembaga DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

* Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 : DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur “Penyelenggaraan” Pemerintah Daerah

* Pasal 148 UU No. 23 Tahun 2014 : 1) DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai Unsur “Penyelenggara” Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah “Pejabat Daerah” Kabupaten/Kota.

Pengaturan Kedudukan Baru dimaksudkan akan berimplikasi terhadap beberapa hal sebagai berikut : 1. DPRD sebagai unsur “penyelenggara Pemerintahan Daerah” akan berimplikasi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD. 2. Anggota DPRD sebagai “Pejabat Daerah” akan berimplikasi terhadap : a. Hak Keuangan, b. Hak Protokoler. Bagaimana penerapan kedepan di Pemerintahan Kota Salatiga ?.

Semoga dengan kedudukan baru DPRD sebagai “Pejabat Daerah” dapat menjadi daya ungkit guna mewujudkan tertib tata kelola pemerintahan yang baik.

****)Penulis adalah Sekretaris DPRD Kota Salatiga***

Trisula Kecamatan

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat, harapan dan kenyataan ?

Oleh: Drs. Sulistya, M.Si^{*}



Apakah yang menarik dari judul tulisan tersebut ketika kita masih menyaksikan dengan tertegun-tegung melihat kinerja Kecamatan sekarang ini? Kecamatan merupakan bagian dari Pemerintah Kota yang tugas pokok dan fungsinya tertera jelas di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan Satuan Perangkat Daerah seperti SKPD yang lain. Keberadaan sebuah kecamatan yang diatur di dalam Undang-undang tersebut dikenal dengan tiga fungsi, sehingga ketiga fungsi itu digambarkan sebagai trisula (senjata tajam bermata tiga) yaitu meningkatkan (1) koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, (2) pelayanan publik dan (3) pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Ketiga alasan kelahiran kecamatan tersebut telah membawa konsekuensi luas, kenapa? selain intensitas koordinasi penyelenggaraan yang memiliki spektrum luas menyangkut hajat hidup orang banyak dari sejak manusia lahir sampai dengan mati, juga terkandung fungsi pelayanan publik yang oleh masyarakat dimaknai dengan tuntutan pelayanan yang semakin hari harus semakin baik, tidak saja pelayanan yang sifatnya non perijinan seperti yang selama ini kenal seperti surat pengantar, penerbitan KK dan KTP atau pelayanan sejenis yang merupakan kewenangan camat namun juga tuntutan jaman untuk pelayanan yang berupa perijinan, sejak 1 Januari 2015, keempat kecamatan di Salatiga telah melakukan pelayanan perijinan administrasi terpadu kecamatan yang disebut PATEN meliputi 5 perijinan tertentu, seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas bangunan kurang dari 100 meter persegi, Ijin Gangguan (HO), Ijin Pemakaman di TPU Pemerintah, Ijin Reklame temporer di wilayah kecamatan serta Ijin Usaha Skala Kecil.

Kecamatan yang dipimpin oleh camat dibantu oleh 5 orang pejabat struktural dan staf sekitar kurang lebih 23 orang menempatkan dirinya pada garda terdepan pada pelayanan masyarakat dengan berbagai permasalahan baik kualitas sumber daya manusia (man) dan sarana prasarana (materials), tatacara dan SOP yang berkesesuaian dengan peraturan (Methode) serta besaran dukungan pendanaan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan

tugas untuk menggaji pegawai, menunjang operasional (money) yang belum terstandar seperti urusan-urusan lain.

Implementasi dari desentralisasi adalah dibentuknya dinas yang merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, maka nomenklatur dinas bisa jadi mengambil salah satu urusan atau sama dengan urusan kewenangan yang diberikan oleh Pemingkah Pusat kepada daerah, urusan pendidikan maka bisa jadi nanti akan adanya Dinas Pendidikan, ada Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya, sedangkan kecamatan merupakan satuan perangkat daerah yang karena jaraknya berdekatan langsung dengan masyarakat memiliki spesifikasi tugas pokok kewilayahan yang mengurus cakupan hajat hidup orang banyak dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari yang bersifat sosial seperti masalah masalah kemiskinan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, koordinasi pemeliharaan sarana prasarana umum serta mewujudkan situasi kondusifitas di wilayah sampai dengan urusan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum maupun dengan Pemilihan Kepala Daerah, tidak jarang pendapat para pengamat Pemerintahan dikatakan bahwa SKPD Kecamatan tidak memiliki core bussines yang spesifik, dibandingkan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain dimana dinas tersebut mengampu hanya satu urusan wajib atau pilihan secara khas.

Perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur (KBBI), merupakan pekerjaan yang memberikan jaminan bahwa urusan-urusan yang memiliki aras dan cakupan kewilayahan dapat diselenggarakan antara dinas atau badan dengan masyarakat namun tidak selamanya koordinasi berlangsung dengan baik, bukan saja masalah yang dihadapi terlalu rumit atau sophisticated tetapi ternyata harus melibatkan spektrum organisasi lain yang tidak berada langsung di kecamatan seperti masalah konflik kepentingan pertanahan yang menahun berkaitan dengan klaim beberapa yang merasa memiliki kepentingan tersebut. Salah satu kasus pertanahan adalah masyarakat Purwosari dengan pihak TNI AD, kasus tanah yang dihuni beberapa anggota masyarakat sudah bertahun-

tahun lamanya vis a vis dengan salah satu klaim dari pihak lain yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik instansinya merupakan contoh umum yang dijumpai hampir beberapa kecamatan, Koordinasi yang dilakukan tidak saja masalah pertanahan yang berskala luas ada juga masalah pertanahan yang ada disektor privat akan berujung perseteruan yang melibatkan atau menarik kecamatan harus hadir sebagai mediator, seperti rencana penutupan akses jalan menuju perumahan oleh pemilik tanah karena belum terselesaikannya hak kewajiban (yang ujungnya tentu saja uang) antara pengembang perumahan dengan pemilik kapling.

Meskipun di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lampau menempatkan camat bukan merupakan kepala kewilayahan (bukan merupakan wakil Pemerintah Pusat di wilayah) seperti ketika masa orde baru namun secara faktual peran dan kedudukan kecamatan nampaknya masih seperti itu, paling tidak masyarakat masih menganggap bahwa kecamatan diharapkan berperan aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini membawa konsekwensi bahwa masyarakat berharap banyak kecamatan berlaku sebagai pengambil keputusan seperti yang dilakukan camat-camat ketika, akibatnya banyak sekali urusan pemerintahan umum yang berskala konflik tidak dapat ditangani secara langsung oleh camat secara cepat dan tepat.

Permasalahan kerentanan sosial yang diakibatkan oleh kerukunan berkehidupan agama juga sering muncul menunjukkan wajahnya di dalam kerawanan yang diekspresikan melalui penolakan masyarakat-penolakan dan yang mengatas namakan tokoh, lebih khusus lagi mengenai pendirian rumah ibadah dari pengikut agama juga memberikan warna tersendiri bagaimana peran kecamatan di dalam menciptakan keselerasan antara komponen masyarakat agar tidak terjebak di dalam konflik horizontal, antara masyarakat yang menginginkan berdirinya tempat ibadah dengan sebagian masyarakat yang menolak atas tempat ibadah tersebut berdiri, sebagai kepala pemerintahan kecamatan maka peran camat melakukan konsultasi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik itu dan sebagai katub peredam agar tidak menjadi konflik terbuka. Peran ini kadang-kadang dimaknai oleh beberapa kelompok bahwa kecamatan melakukan taktik mengulur ulur waktu atau dalam bahasa awan “ hanya mencari aman saja “atau bahkan melakukan pembiaran, baik oleh para pihak yang menolak dan pihak yang menginginkan.

Kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah menempatkan diri sebagai fasilitator atau mediator dengan instansi vertikal ataupun dengan dinas terkait, kehadiran pimpinan kecamatan yang tergabung dalam Forkompinca selama ini mati suri dikarenakan dasar untuk keberadaan kelembagaan tersebut tidak jelas dan tidak ada sama sekali alokasi dana untuk

keperluan kepentingan tersebut sehingga kesungguhan kecamatan di dalam merampungkan beberapa masalah kemasyarakatan di waktu yang lalu sedikit melamban ketika harus berhadapan dengan masalah yang berat, jalan solusinya tentu saja permasalahan tersebut yang sebenarnya merupakan kelas kecamatan di bawa ke ranah pemerintah kota, di masa yang akan seiring dengan penguatan kelembagaan kecamatan sebagai pelaksana Pemerintahan Umum yang didelegasikan walikota kepada kecamatan akan merubah kesan lamban kecamatan.

Peran pemberdayaan versus pengerahan mobilisasi

Ujung trisulla kedua dinamakan urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan harus dimaknai sebagai sebuah usaha untuk menjadikan masyarakat yang powerless menjadi masyarakat yang semakin maju dan kuat baik secara kelembagaan, finansial. Tanggung jawab yang dipikul adalah membuat meaningful kehadiran kecamatan melalui peran para lurah sebagai perangkat kecamatan melakukan berbagai upaya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan awarness kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti gerakan PKK, track record PKK yang sudah mengarungi beberapa jaman pemerintahan telah menempatkan lembaga masyarakat ini sebagai wadah para ibu ibu beredukasi mengenai bagaimana memberdayakan keluarga melalui Program pokok PKK, kehadiran dan manfaat yang diterima sudah bukan merupakan kegiatan top down dari atas ke bawah namun sudah menemukan bentuk sebagai satuan gerakan mandiri dianggap merupakan kebutuhan masyarakat lokal untuk empowerment dengan berbagai terobosan yang dikelola dari masyarakat untuk masyarakat dan demi masyarakat tertama para wanita, PKK dipandang sebagai model pemberdayaan masyarakat wanita yang paling sukses dan melibatkan berbagai tingkatan strata dari RT RW kelurahan, hanya gaung di tingkat RW ataupun RW sangat dirasakan kemanfaatannya , pemberdayaan sejenis kemudian lahir atas ilham dan inspirasi dari gerakan yang sudah bertahun-tahun berjalan dengan baik ini,

Peran kelembagaan RT/RW juga mendapatkan momentum bertumbuh dengan baik, meskipun kehadiran RT RW bukan merupakan organnisasi Pemerintah Daerah namun peran yang dimainkannya sangat membantu pemerintah di dalam memverifikasi, memilih dan memilah serta peran-peran mengakomodir menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah domain lokal kampung, dusun menjadikan kedudukan dan peran RT RW sangat penting, ini mengakibatkan peran masyarakat di dalam pembangunan dapat dirunut dan dapat dilihat dari sini, gerakan pembangunan yang dibiayai oleh dari dan oleh masyarakat adalah ciri khas

kelembagaan RT dan RW, pengamanan swakarsa seperti pos kamling yang dilakukan secara mandiri diorganisir secara rapi dengan melibatkan partisipasi di setiap kampung, setiap perumahan telah menghadirkan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, peran membangkitkan motivasi untuk membangun akan lingkungan yang bersih hijau dan berwawasan lingkungan adalah wujud pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan harus dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal, partisipasi dalam membayar pajak dan Bumi yang sekarang sudah menjadi pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Salatiga adalah buah pemberdayaan masyarakat yang sudah dirintis selama bertahun-tahun, pemberdayaan tidak akan membuahkan hasil apapun ketika role model dari pemimpin formalnya menunjukkan arah yang berlawanan.

Menurunkan pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan

Trisula ketiga adalah pelayanan publik, paradigma terbaru mengenai kecamatan sebagai ujuang tombak atau simpul pelayanan kepada publik menjadi pekerjaan besar yang sudah tidak boleh ditawarkan lagi, di tengah meningkatnya harapan masyarakat atas layanan terbaik, tercepat dan terjangkau, paradigma tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat yang tidak ingin terlalu banyak membuang waktu ketika harus mengurus ijin-ijin di kecamatan, masyarakat menginginkan transparansi mengenai prosedur, besaran biaya dan agihan tahapan waktu yang diperlukan untuk sebuah urusan.

Pelaksanaan program PATEN yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sejak tahun 2015 diharapkan akan menggeser nilai-nilai konvensional sistem pelayanan kecamatan, menjauhkan dari nilai negatif Kalau bisa dipermudah kenapa dipercepat, membuang jauh-jauh nilai tersebut dan merubah konsep nilai kalau bisa dipercepat kenapa dipelambat adalah motto utama yang dibawa kecamatan untuk meningkatkan dan mengakselerasi, bagaimanapun Kecamatan sebagai SKPD akan dinilai dan dihargai keberadaannya ketika sistem penilaian kinerja pegawai melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) diperkenalkan, SKP merupakan acuan bagi setiap jabatan untuk bertanggung jawab atas tugas pokok fungsi dari jabatan dan konsekuensi karena di akhir tahun akan nampak antara perjanjian kerja yang sudah dibuat dengan realita di lapangan, ini sungguh tidak mudah bagi seseorang yang ditempatkan di kecamatan untuk tidak melakukan tugas pelayanannya secara baik dan benar.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kecamatan sudah berusaha merubah dirinya menjadi SKPD yang mengedepankan good and clean governance, tidak melakukan berbagai hal yang menciderai Standart Operating Prosedur yang sudah dibuat dan dijadikan Motto setiap Kecamatan, SOP itu

juga nanti akan mengontrol bagaimana proses dan progress sebuah perijinan oleh seseorang pemohon di buat sampai dengan diterbitkannya perijinan yang menjadi kewenangan Camat, berapa biaya yang harus dibayarkan kepada Kas Daerah.

Kendala dan Hambatan

Sebuah manajemen yang baik bagi perubahan kecamatan terletak bagaimana merubah paradigma lama menjadi sebuah nilai baru yang terukur dan transparan, selama ini sebagai sebuah SKPD yang membawahi kelurahan masih belum menemukan Platformnya di dalam Catuan Biaya pendanaan, sehingga tugas pokok fungsi yang melekat pada struktur organisasinya, seperti Kasi Tramtib, Kasi Pemerintahan tidak atau belum dibiayai secara maksimal, selain mendapatkan dana APBD Kota Salatiga yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan, berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2015 Kecamatan akan mendapatkan dana APBN dalam kapasitasnya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum (setelah wewenang Walikota diserahkan atau didelegasikan pada Camat), Kelurahan yang selama ini identik dengan sebuah pemerintahan paling bawah juga merasakan dampak yang dirasakan oleh kecamatan maka Undang-undang Pemerintahan Daerah menginstruksikan agar Pemerintah Kota Salatiga memberikan alokasi Dana bagi kelurahan sebesar 5 % dari APBD dikurangi dana DAK, hal ini diberikan mengingat di Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pemerintah memberikan kepadanya dana Desa yang besarnya bervariasi sampai dengan 1.4 Milyar, guna dapat meningkatkan semangat maka Kota yang tidak memiliki desa, memberikan Kebijakan pengalokasian dana kelurahan agar dapat berkembang layaknya desa, ini merupakan sebuah tantangan bagi para pengambil kebijakan di Salatiga, pemberian dana yang sedemikian itu akan menyebabkan perubahan peranan kelurahan menjadi semakin kuat di dalam menghadapi dinamika masyarakat dengan suka dukanya, dana kelurahan tersebut selain diperuntukkan bagi pembangunan pengadaan sarana prasarana lokal kelurahan dengan memberikan peran yang lebih dengan cara swakelola.

Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat setahun dua ke depan kita dapat melihat dan merasakan bagaimana SKPD Kecamatan dengan trisula fungsi itu memainkan peranan di wilayah dengan baik untuk sesegera mungkin menjadi etalase, sebuah pajangan kinerja dan menjadi best practise pelaksanaan Good and Clean Governance, semoga.

***Penulis adalah Kepala Bagian
Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah
Kota Salatiga***

Dibutuhkan Prasarana Pendidikan

Pelaksanaan Ujian Nasional ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Memang belum semua sekolah menggunakan sistem CBT ini karena masih ada sekolah yang masih menggunakan sistem manual atau Paper Based Test (PBT).

Menurut Ibu Adriana Susi Yudhawati, anggota DPRD Kota Salatiga Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Kota Salatiga sudah ada 3 sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional dengan sistem Komputerisasi. Diantaranya SMA 1, SMK N 2 dan SMKN 3. Sebenarnya masih ada sekolah lain yang ditunjuk untuk melaksanakan Ujian Nasional sistem komputerisasi ini. Namun mereka mundur karena merasa belum mampu baik dari sarana dan prasarananya.



Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd

Kelulusan siswa tahun ini tidak hanya di tentukan dari nilai Ujian Nasional. Kriteria penilaian diambil dari perbandingan antara Nilai Ujian Nasional dengan Nilai Ujian Sekolah yaitu 50:50.

Nilai Ujian Sekolah sendiri di bagi menjadi 2 yaitu 70% bobot dari Nilai Rapot dan 30% bobot dari nilai Ujian Sekolah. Guna mendukung kelancaran Ujian Nasional sistem CBT ke depan, Pemerintah diharapkan segera menyediakan komputer tambahan, menyediakan genset serta menyediakan sarana dan prasarana lainnya. **(Pri/ss)**.



Bagas Aryanto, SP

Diperlukan Target Produksi Hasil Pertanian

Bagas Aryanto, SP., anggota dewan Kota Salatiga menjelaskan bahwa kebijakan Menteri Pertanian pada tahun 2015 di bidang pangan adalah adanya swasembada padi, jagung, dan kedelai pada tiga tahun kedepan.

Menteri Pertanian juga telah melakukan kerja sama atau MOU antara Menteri Pertanian dengan TNI Republik Indonesia. Dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara Walikota Salatiga dengan Komandan Kodim 0714/Salatiga beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, dalam rangka mencapai swasembada pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 telah menetapkan target produksi padi sebesar 11.136.967 ton Gabah Kering Giling.

Bagas Aryanto menjelaskan, besarnya produksi tanaman padi yang ditargetkan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Salatiga pada tahun 2015 sebesar 8.668 ton Gabah Kering Giling, tanaman jagung sebesar 968 ton pipil kering dan tanaman kedelai sebesar 17,90 ton.

Untuk itu, Dinas Pertanian dan Perikanan perlu untuk merencanakan target produksi per-Kelurahan per-Kelompok Tani serta penyediaan kebutuhan petani penerapan teknologi tepat guna sehingga target Kota Salatiga dapat tercapai.

"Meningkatkan peran serta Penyuluh Pertanian dalam mendampingi dan membina petani / kelompok tani serta meningkatkan kerja sama antar elemen, baik petani, penyuluh maupun TNI diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan," harap Bagas Aryanto. **(lf/ss)**



Foto: boedy's

Sri Setyo Pamilih Karni

Peningkatan Sarana Pendidikan

Kota Pendidikan demikian salah satu road map yang akan dituju oleh Kota Salatiga hal ini yang menjadi perhatian khusus dari anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga Sri Setyo Pamilih Karni, beliau menilai kondisi pendidikan di Kota Salatiga sudah baik namun masih perlu adanya pembenahan terutama dibidang pendanaan dan sarana prasarana pendidikan.

“Prestasi yang didapat oleh anak didik kita sudah banyak dicapai namun kadang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga, seharusnya ada dana yang dialokasikan khusus untuk siswa yang berprestasi semacam beasiswa atau penghargaan yang lainnya sehingga siswa merasa disupport oleh Pemkot sehingga bisa lebih optimal dalam berprestasi karena prestasi mereka akan turut mengangkat nama Salatiga sebagai Kota Pendidikan“ ujar legislator dari dapil Sidomukti ini.

Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana juga perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemkot “Jangan sampai ada gedung sekolah yang perlu perbaikan luput dari pantauan sehingga membahayakan proses belajar mengajar, hal ini tidak boleh terjadi karena jika memang Pemkot memandang perlu adanya penambahan dana untuk pendidikan DPRD Kota Salatiga akan mempertimbangkannya asalkan peruntukannya jelas” pungkas Bu Karni begitu biasanya beliau dipanggil. (uj/ss)

Merawat Prasasti Plumpungan

Kota Salatiga sangat erat dengan Prasasti Plumpungan. Prasasti yang berada di Dukuh Plumpungan, Desa Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga ini sudah ada sejak tahun 750 Masehi atau kira-kira berumur 1264 tahun. Prasasti yang ditulis dengan Bahasa Jawa Kuno dan Sansekerta ini bertuliskan “ Sris Astu Swasti Prajabyah” yang memiliki arti “Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat”. Prasasti yang berisi ketetapan hukum mengenai status tanah perdikan (swatantra) bagi desa hampra atau kebebasan daerah untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Prasasti Plumpungan sampai saat ini masih terawat dengan baik. Peran serta masyarakat dan pemerintah sangat membantu untuk perawatan prasasti ini. Disana sekarang sudah dibangun pendopo tempat prasasti, bangunan pengelola serta kamar mandi/toilet.



Eny Tri Yuliasuti

Namun sayang, prasasti ini kurang diminati masyarakat sebagai tempat wisata. Untuk itu ibu Eny Tri Yuliasuti yang saat ini bergabung di Komisi C memiliki gagasan untuk Pemerintah Kota Salatiga lebih mengembangkan dan mengelola Prasasti Plumpungan ini dengan baik. Agar lebih dikenal masyarakat luas serta menjadi tempat wisata di Kota Salatiga. (pris/ss)



Foto: boedy's

Agus Joko Setiawan

Menghidupkan dan Mengenalkan Makanan Khas Salatiga

Meskipun Kota Salatiga merupakan kota yang kecil, namun kota ini sangat strategis untuk tempat persinggahan atau kota transit. Dengan banyaknya daerah sekitar Salatiga yang banyak menjadi tempat pariwisata, maka Kota Salatiga sangat tepat jika dijadikan sebagai Kota Transit.

Agus Joko Setiawan, Anggota DPRD Salatiga dari Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat mengatakan bahwa sebagian masyarakat Salatiga memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sangat strategis guna menghidupkan olahan makanan khas Salatiga sebagai oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Salatiga.

"Di antara produk UMKM tersebut, banyak yang sudah terkenal di luar Kota Salatiga. Adapun jajanan khas Kota Salatiga tersebut adalah ting-ting gepuk, ronde dan kripik paru" ungkap Agus Joko Setiawan.

Menurutnya industri UMKM di Salatiga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata kuliner bagi warga Salatiga itu sendiri maupun luar Salatiga.

"Dengan mengadakan kunjungan industri UMKM misalnya!", tandas Pak Wawan begitu panggilannya.

"jika pengunjung tahu cara membuatnya akan bertambah wawasannya akan kuliner khas Salatiga. Dengan begitu, pengunjung lebih mengenal makanan khas Salatiga karena melihat dan belajar memproduksi makanan tersebut.", tutup Agus Joko Setiawan. (is/ss)

Cukai Meningkatkan PAD

Anggota dewan Kota Salatiga, Drs. Sarmin mengatakan bahwa, tidak hanya rokok dan minuman keras yang dikenai cukai. Selain itu ada beberapa produk yang berbahan kimia juga dikenakan cukai.

"Selain itu cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan Undang-Undang, sebagai salah satu sumber penerimaan negara, berasal dari masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dan pembangunan," terang Drs. Sarmin.

Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sebesar-besarnya sumber pendapatan yang sah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Foto: boedy's

Drs. Sarmin

Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar cukai, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum aparat dan masyarakat

"Manfaat bagi Kota Salatiga jelas ada, karena tiap tahun kota ini mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang salah satunya diperuntukkan pembangunan dan sosialisasi. Oleh karenanya kita harus sadar bahwa dengan menjual atau membeli barang bercukai berkontribusi pula terhadap pembangunan," Pungkasnya. (lf/ss)

Pengembangan Konsep Wisata Edukasi

Kota Salatiga mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai kota wisata edukasi. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota Salatiga dari Komisi C, Latif Nahari, ST.

Menurutnya, wisata edukasi merupakan konsep wisata yang menerapkan pendidikan nonformal tentang suatu pengetahuan kepada wisatawan. Mereka yang berkunjung ke suatu objek wisata dapat dijadikan salah satu daya tarik tersendiri jika bisa dikelola dengan profesional.

"Di tempat tersebut pengunjung dapat melakukan kegiatan wisata dan belajar dalam satu waktu dengan metode yang menyenangkan dan tentunya proses pembelajarannya mudah untuk diingat", tegas Latif.

Dijelaskan bahwa di beberapa daerah seperti Bandung dan Bogor konsep wisata edukasi yang



Latif Nahari, ST

dikelola secara baik ternyata dapat menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

"Disamping juga wisata ini juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat disekitar lokasi wisata edukasi tersebut", tambah Latif Nahari, ST. *(ts/ss)*



KH. Muh. Syafi'i

Salatiga Tolak Paham Radikalisme

Anggota dewan dari PKB Salatiga KH. Muh. Syafi'i beranggapan bahwa, isu yang sensitif dan menarik saat ini adalah masalah paham radikalisme. Di Salatiga marak seminar, diskusi dan spanduk yang terbentang bahwa masyarakat menolak radikalisme. Salah satu alat penangkal radikalisme adalah kembali kepada penanaman Pancasila.

"Salah satu fenomena dalam era globalisasi adalah terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa bahkan antar komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil. Di antara nilai atau faham yang melintas-batas itu adalah radikalisme. Faham ini karakternya adalah selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar orang lain. Sudah tentu radikalisme dan faham sejenis lainnya, sangatlah bertentangan dengan Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebhinekaan," jelasnya.

Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan terus memperkuat Pancasila yang telah menunjukkan dan memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai, harmonis dan penuh toleransi dengan siapa saja yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, kita harus terus-menerus menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila kepada semua generasi, utamanya para generasi penerus bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

"NKRI adalah harga mati, semua WNI wajib mempertahankan" tandas Pak Syafi'i. *(lf/ss)*

Potensi sebagai Kota Agrowisata

Salatiga yang berada dikaki Gunung Merbabu ini memiliki hawa yang sejuk dan segar, selain itu juga memiliki pemandangan yang cukup bagus, sehingga sangat cocok untuk dijadikan kota agrowisata.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Salatiga, Sudiono yang duduk di anggota komisi A. Menurutnya, setiap wilayah yang berada di Salatiga memiliki potensi yang cukup bagus untuk di jadikan tempat agrowisata. Baik dari udara, pemandangan serta kekayaan dan kerajinan yang ada di daerah-daerah tersebut.



Foto: boedy's

Sudiono

“Kampung Tegalombo yang berada di Kelurahan Blotongan Salatiga saat ini telah dijadikan tempat agrowisata sebagai kampung durian dan sudah diresmikan pada tanggal 24 Maret 2015. Di kampung ini terdapat sekitar 3.000 pohon durian yang hasil produksi setiap panennya mencapai 800 sampai dengan 900 kwintal. Kampung durian ini di kelola kelompok tani dengan baik”, kata anggota DPRD dari fraksi Golkar ini.

Ditambahkan bahwa, selain membutuhkan penunjang perekonomian masyarakat, juga dibutuhkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai jenis-jenis bibit yang unggul.

“Hal ini akan mengangkat potensi yang ada di Salatiga, sehingga Salatiga bisa dijadikan tempat wisata yang bisa dikunjungi”, ujar Sudiono. **(pri/ss)**



Foto: boedy's

dr. Suryaningsih. M.Kes

Mendukung Kawasan Tanpa Rokok

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain di sekitar perokok (perokok pasif). Produk olahan yang berbahan dasar tembakau ini mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan seseorang antara lain dapat menimbulkan efek ketagihan, menimbulkan berbagai macam penyakit.

Melihat bahaya tersebut, Pemerintah Kota Salatiga membuat raperda tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini di dasari UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan lebih khusus pasal 115 ayat (2) yaitu bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya.

“Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat sekolah, tempat bermain anak, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang sudah di tetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok”. kata anggota DPRD Salatiga dr. Suryaningsih.

Dijelaskan bahwa tidak hanya itu saja, larangan untuk menjual, mengiklankan serta mempromosikan produk olahan berbahan dasar tembakaupun juga diberlakukan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

“Bagi yang melanggar aturan tersebut baik perorangan, badan ataupun pimpinan akan mendapatkan teguran dan juga akan dikenakan denda administrasi” tambahnya.

“Saya dukung upaya Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Saya juga minta dukungan serta peran aktif Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha” tutur dr. Suryaningsih. **(pri/ss)**

Penjual **SLAMET WIDODO** NASI JAGUNG GORENG “LERENG CINTA”



Slamet Widodo, penjual nasi jagung goreng dari Bendosari.

Jika kita mendengar nama masakan nasi goreng tentu saja sudah biasa, nasi jagung pun sudah biasa kita dengar, namun kali ini adalah Nasi Jagung Goreng. Makanan yang jarang dan bahkan belum kita kenal ini ternyata bisa menjadi sebuah sajian yang enak dan bahkan sehat. Nasi jagung goreng ini bisa menjadi salah satu daftar kuliner kita ketika berpergian ke Salatiga. Tepatnya di Desa Bendosari RT 06 RW 05 Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Salatiga.

Slamet Widodo, pria berusia 40 tahun ini merupakan pemilik warung “Lereng Cinta” yang terkenal dengan makanan uniknya yaitu nasi jagung goreng. Seperti halnya nasi goreng, nasi jagung goreng ini juga di goreng dengan bumbu-bumbu nasi goreng biasa. Namun berbeda dengan nasi goreng biasa, nasi ini menggunakan bahan baku dari jagung, bukan beras. Dengan tambahan irisan sosis, telur, ayam, berbagai macam sayuran seperti jagung manis, kacang polong dan wortel, nasi jagung goreng ini sangat nikmat sekali untuk kita lahap serta menyehatkan. Tidak butuh merogoh kocek yang sangat besar, cukup dengan Rp. 10.000,00 per piring kita dapat menikmati makanan unik tersebut. Warung “Lereng Cinta” buka setiap hari mulai pukul 18.00-22.00 WIB.

Pak Widodo begitu sapaannya memulai usaha unik ini sejak 3 tahun silam. Tak begitu banyak pedagang yang menjajakan sajian nasi jagung goreng di Salatiga, bahkan hampir tidak ada kecuali di Warung “Lereng Cinta”. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu alasan ide peluang usaha kuliner yang menarik bagi bapak beranak satu ini.

Usaha kuliner yang Widodo lakukan tidak serta merta mendapatkan jalan yang mudah. Tempat yang ia gunakan tidak strategis dan nasi jagung goreng ini belum begitu dikenal oleh warga Salatiga. Namun suami dari ibu Endah Susilowati (38) memiliki keyakinan bahwa setiap ada penjual pasti ada pembeli. Dari situlah ia giat untuk mempromosikan Warung “Lereng Cinta” melalui social media seperti facebook.

Usahanya tak sia-sia, perlahan tapi pasti banyak pengunjung satu persatu datang untuk membeli hasil kuliner olahannya. Promosi tak hanya berawal darinya, pembeli yang merasa puas pun ikut mempromosikan nasi jagung goreng melalui social media dengan mengupload foto nasi jagung goreng ke social media.

Dengan promosi yang ia lakukan serta informasi yang istilahnya “getok tular” dari pengunjung, saat ini Widodo dapat membuat nasi jagung goreng ± 50 piring perharinya. Tidak hanya itu, ia pun juga telah memiliki satu karyawan yang membantu warungnya. Selain itu warung “Lereng Cinta” tidak hanya digunakan untuk dagang saja namun di warung “Lereng Cinta” juga disediakan perpustakaan sederhana untuk para pengunjung yang memiliki hobi membaca.

Walaupun saat ini pengunjung sudah mulai ramai, namun Widodo lereng cinta begitu nama panggilannya tidak lantas puas begitu saja. Banyak cita-cita dan harapan yang harus ia raih. Salah satu cita-cita dan harapannya yang ingin diraih yaitu ia ingin memiliki warung cabang minimal perkecamatan di Salatiga ada satu warung “Lereng Cinta” dengan makanan unik nasi jagung goreng. *(is/ss)*

TEBAK WAJAH JIWARAGA 27

Total Hadiah senilai Rp. 250.000,00
untuk 5 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00

KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh.
2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwara 27 yang telah disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwara, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga.
5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim serta No. Telp.
6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwara paling lambat tanggal 29 Juli 2015.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah senilai Rp. 50.000,00. dan bingkisan dari Harian Suara Merdeka.
8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwara Edisi III Tahun 2015
9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.



KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 27



Drs. Sarmin

**Jawaban Tebak Wajah
Jiwaraga 26 :
Drs. Sarmin**

**PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 26**

1. **ARIANA WERDI ASTUTI**
Jl. damar No. 51/6A RT.03/02 Kalicacing - Salatiga.
2. **ANIS KUSUMARDANI**
SD Negeri Tingkir Lor 01 Salatiga
3. **IDA PARMİYATI**
BAPPEDA Kota Salatiga, Jl. Sukowati 51 Salatiga
4. **ALFIAN**
SMK Negeri 2 Salatiga, Jl. Parikesit Salatiga
5. **DIAN KURNIAWATI**
BAPPEDA Kota Salatiga, Jl. Sukowati 51 Salatiga

Foto ssi/fj



Kenjungan DPRD di Pasar Tradisional Rejosari Salatiga



Ketua DPRD Kota Salatiga, M.Teddy Sulistio SE mengatakan, Disperindagkop Salatiga harus tidak sewenang-wenang dalam mengultimatum warga dengan dasar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Beberapa syarat harus dipatuhi terkait kerjasama dengan pihak ketiga atau investor. Diantaranya, proses lelang kerjasama investasi harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Terkait kompensasi, kontribusi dan pengelolaan retribusi, harus diatur secara jelas dalam perjanjian kerjasama. Masalah harga los dan kios harus menganut sistem subsidi silang dan harus terjangkau”, jelas Bung Teddy. **(ss/ss)**.



FORUM KOMUNIKASI WARTAWAN INDONESIA

Penganugerahan

Inspiratif Indonesia

015 Amartapura Ball... d Candi Hotel Ser



DANCE ISHAK PALIT, M.Si
Menerima Penganugerahan Tokoh Inspiratif Indonesia 2015
13 Juni 2015, di Grand Candi Hotel Semarang.